

I. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara tropis memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama di wilayah pesisir. Salah satu ekosistem khas yang ada di wilayah pesisir adalah terumbu karang. Luas terumbu karang yang ada di perairan Indonesia adalah 85.707 km² atau 14% dari total luasan terumbu karang di dunia yaitu 617.000 km² (Tomascik *et al*, 1997 dalam Tuwo, 2011). Terumbu karang terdiri dari berbagai binatang karang hermatipik dan organisme karang lainnya yang bersimbiosis dengan *zooxantellae* yang menghasilkan produktivitas yang tinggi sebesar 1500-3500 gC/m²/tahun (Nybakken, 1992). Tingginya produktivitas di ekosistem terumbu karang, menjadikannya sebagai ekosistem yang kaya akan manfaat yang juga beragam, baik dari segi ekologis maupun dari segi ekonomis.

Secara ekologis, terumbu karang berperan sebagai : (1) produsen primer yang mampu menghasilkan 15-35 ton setara karbon per Ha per tahun ; (2) habitat bagi biota laut yang bernilai ekonomi tinggi (daerah pemijahan (*spawning ground*), daerah pengasuhan (*nursery ground*) dan mencari makan (*feeding ground*) ; (3) penyedia pasir untuk pantai ; (4) pendaur zat-zat hara secara efisien ; (5) penghalang daerah pantai dari hempasan dan ombak serta erosi pantai. Sementara itu, secara ekonomis, terumbu karang berkontribusi sebagai : (1) objek wisata, baik wisata selam maupun wisata pasir putih ; (2) tempat penangkapan berbagai jenis ikan komersial (ikan hias dan ikan konsumsi) ; (3) penyedia alternatif mata pencaharian dari sektor perikanan ; (4) laboratorium alam untuk menunjang penelitian dan pendidikan ; (5) penghasil bahan konstruksi bangunan dan pembuatan kapur ; dan (penghasil bahan aktif untuk obat dan kosmetik (Tuwo, 2011). Seiring dengan adanya manfaat ekologis dan ekonomis menyebabkan ekosistem terumbu karang rentan terhadap gangguan yang berasal dari aktifitas manusia, seperti pencemaran dan penangkapan ikan tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Pengembangan Oseanologi (P2O) LIPI, kondisi terumbu karang di Indonesia terus mengalami peningkatan

degradasi setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2000, menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang Indonesia 41,78% dalam keadaan rusak, 28,30% dalam keadaan sedang, 23,72% dalam keadaan baik dan 6,20% dalam keadaan sangat baik sedangkan pada tahun 2011 kondisi terumbu karang Indonesia 30,76% terumbu karang berada pada kondisi yang kurang baik atau rusak, 36,90% sedang, 26,95% baik dan hanya 5,58 persen karang yang kondisinya sangat baik (Tempo News, 2012).

Menurut Sudiono (2008) akar permasalahan penyebab kerusakan terumbu karang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya pertambahan penduduk, kemiskinan masyarakat pesisir, rendahnya pemahaman tentang penting kelestarian terumbu karang yang disebabkan kurangnya sosialisasi dan pembinaan, rendahnya kualitas SDM, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, degradasi habitat di wilayah pesisir, pencemaran (sedimentasi), belum optimalnya pemanfaatan jasa-jasa lingkungan sebagai sumber mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan bagi masyarakat lokal. Selain itu, mutlak diperlukan dokumen perencanaan pengelolaan terumbu karang seperti Perencanaan pengelolaan dapat terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi untuk mengoptimalkan upaya meminimalisasi ancaman dan faktor-faktor penyebab kerusakan terumbu karang, terkait dengan upaya maksimal kepentingan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Pemerintah Daerah selaku pengambil kebijakan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan serta kearifan lokal.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Khasanah (2008), bahwa dibutuhkan pembuatan rencana strategis untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu sesuai UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil karena dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam memerlukan keterpaduan perencanaan yang baik dan bijaksana membutuhkan pengetahuan mengenai sumberdaya tersebut, baik dari segi pemanfaatan sumberdaya alam tersebut harus dimanfaatkan berdasarkan prinsip kelestarian dan konservasi.

Kerusakan yang terjadi pada terumbu karang dibutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya untuk proses pemulihannya agar dapat seperti kondisi awal. Sebagai contoh, kerusakan alami akibat topan, membutuhkan waktu 25-30 tahun untuk pulih secara sempurna (Nybakken, 1992). Lamanya waktu pulih terumbu karang dari kerusakan dipengaruhi oleh laju pertumbuhannya yang hanya sebesar 0,2-8 mm/tahun (Stoddard, 1969 *dalam* Nybakken, 1992).

Menurut UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, konservasi didefinisikan sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya demi terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Lebih lanjut di dalam UU No. 27 Tahun 2007 pada bagian ketiga tentang Konservasi Pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa Konservasi Wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk : (a) menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; (b) melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; (c) melindungi habitat biota; dan (d) melindungi situs budaya tradisional.

Upaya pengelolaan terumbu karang dalam konteks pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) merupakan bagian dari Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perekat hubungan antar beberapa undang-undang. Dalam arti bahwa UU No. 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan pada Pemerintah Daerah untuk mengaplikasikan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya, dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sesuai dengan kondisi serta situasi sosial ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan pemanfaatan terumbu karang serta kondisi ekosistem terumbu karang itu sendiri.

Kebijakan pengelolaan terumbu karang secara khusus tertuang dalam Kepmen No. 38 tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang. Pedoman Umum sebagaimana dimaksud sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat dalam rangka pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan. Sementara itu, payung hukum mengenai konservasi sumberdaya ikan telah diundangkan pada tahun 2007 berupa PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan sebagai peraturan turunan dari UU No. 45 Tahun 2009. Melalui peraturan-peraturan ini diharapkan hal-hal yang berhubungan dengan konservasi sumberdaya ikan beserta ekosistemnya dalam hal ini terumbu karang dapat diatasi dengan baik.

Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Barat sebagai pelaksana teknis di sektor kelautan dan perikanan telah menetapkan suatu visi, misi, dan tujuan pembangunan perikanan berkelanjutan yaitu “ *Pengaturan dan pelayanan prima mewujudkan perikanan yang berorientasi marinebisnis, berwawasan lingkungan dan berbasis ekonomi rakyat* “. Hal tersebut mengandung beberapa pemahaman sebagai berikut : (1) Berorientasi agribisnis, berarti memenuhi kebutuhan pasar yang mencakup seluruh sub sistem agribisnis sejak “*Off Farm*” hulu, “*On Farm*” sampai dengan “*of farm hilir*”, merupakan usaha yang menguntungkan, meningkatkan pendapatan/ taraf hidup nelayan ; (2) Berwawasan lingkungan, berarti merupakan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, ada upaya pengendalian eksploitasi yang berlebihan, ada upaya pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan ; dan (3) Berbasis ekonomi kerakyatan, berarti berorientasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Menggunakan tolak ukur bahwa mayoritas masyarakat pedesaan pesisir adalah nelayan. Keberadaan ekosistem terumbu karang diharapkan mampu menjawab hal tersebut.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang, maka tindakan preventif berupa kebijakan pengelolaan dan perlindungan terhadap terumbu karang beserta biota laut yang hidup di dalamnya harus dilakukan untuk melindungi kawasan laut dari dampak yang merugikan. Pembentukan Kawasan Konservasi Laut Daerah merupakan salah satu alternatif kebijakan tersebut, dimana

secara eksplisit disebutkan di dalam prinsip pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir bahwa konservasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutan adalah tujuan utama dari pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir (Dahuri, 2008).

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pulau Biawak di Kabupaten Indramayu ditetapkan melalui Perda No. 14 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Penataan Fungsi Pulau Biawak, Pulau Gosong dan Pulau Candikian. Hal tersebut sebagai upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan kawasan tersebut secara optimal dan dengan memperhatikan kaidah-kaidah berkelanjutan dan perlindungan kelestariannya. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan (DISKANLA) Kabupaten Indramayu pada tahun 2012, pulau Biawak dan sekitarnya memiliki luas 12.25 km² dengan 45,4% berada dalam kondisi baik, sisanya 27,3% berada dalam kondisi cukup baik, dan 27,4% berada dalam kondisi kurang baik.

Kebijakan pengelolaan KKLD akan optimal apabila dalam implementasinya diikuti dengan meningkatkan daya dukung kawasan konservasi laut, peningkatan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dalam forum pengelolaan kawasan pesisir terpadu, pengembangan jaringan KKL terpadu untuk mendukung pengelolaan yang efektif, pengembangan ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal dan penegakan hukum peraturan perundangan. Sehingga kerawanan-kerawanan akan teradinya kerusakan pada ekosistem terumbu karang dapat diatasi (Yusmanto, 2012).

Selig and Bruno (2010) menambahkan bahwa segala kegiatan manusia akhirnya akan mempengaruhi struktur bangunan terumbu karang. Keberhasilan kawasan konservasi laut dalam mengembalikan populasi ikan juga merupakan dampak secara tidak langsung keberadaan terumbu karang dalam upaya mengurangi ancaman overfishing, yang selama ini disebabkan oleh rusaknya terumbu karang. Meskipun demikian, secara umum tingkat keefektifan keberadaan kawasan konservasi laut dalam meningkatkan penutupan terumbu karang masih dikaji lebih lanjut.

Menurut Darmasyah (2010) arah strategi pengelolaan kawasan pengembangan di pulau Biawak dan sekitarnya lebih dititiberatkan pada

pemanfaatan dan pengelolaan terumbu karang sebagai kawasan wisata bahari (kategori selam). Pengembangan tersebut merupakan salah satu upaya pengelolaan berupa pencegahan kerusakan ekosistem terumbu karang. Disamping itu, pengelolaan KLLD pulau Biawak dan sekitarnya perlu didukung dengan pengembangan sistem informasi dan penguatan kelembagaan serta meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan wisata bahari demi terwujudnya pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan.

Pengelolaan berkelanjutan akan tercapai apabila aspek ekologi, ekonomi dan sosial berjalan secara seimbang. Peranserta dari para *stakeholder* dan masyarakat sebagai pelaku utama sektor perikanan (nelayan, LSM pecinta lingkungan, POKMASWAS, pelaku wisata, pengunjung dan instansi) sangatlah dibutuhkan dalam pengelolaan KLLD. Mardijono (2008) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara persepsi dan partisipasi serta peran pemerintah didalam pengelolaan terumbu karang di KLLD. Dengan melakukan kegiatan peningkatan SDM, pembentukan dan peningkatan Lembaga Kemasyarakatan (POKJA, POKWASMAS, dan Kelompok MPA) yang dilakukan oleh Pemerintah dapat meningkatkan persepsi dan partisipasi masyarakat tentang arti pentingnya mengelola Kawasan Konservasi Laut Daerah secara bersama (Masyarakat dengan Pemerintah).

Evaluasi terhadap keefektifan pengelolaan suatu kawasan konservasi laut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan strategi pengelolaan yang diterapkan dalam mencapai tujuan, serta mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengetahui keefektifan pengelolaan suatu kawasan konservasi laut diantaranya indikator biofisik, sosial ekonomi, dan proses pengaturan. Indikator biofisik meliputi kondisi habitat terumbu karang dan sumber daya ikan, indikator sosial ekonomi meliputi seluruh aspek masyarakat lokal yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya di daerah kawasan konservasi laut seperti kegiatan penangkapan ikan, budidaya dan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat dan indikator tata kelola meliputi proses penegakan peraturan, tingkat kepatuhan pengguna kawasan, anggaran,

program perbaikan (*recovery*) habitat dan kegiatan lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan kawasan (Susetiono *et al*, 2010).

Hasil dari evaluasi yang dilakukan terhadap keefektifan pengelolaan terumbu karang pada KKLD pulau Biawak dan sekitarnya di Kabupaten Indramayu digunakan sebagai arah pedoman dalam penyusunan strategi kebijakan pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka pertanyaan-penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keefektifan pengelolaan terumbu karang pada Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) pulau Biawak dan sekitarnya?
2. Bagaimana strategi kebijakan pengelolaan terumbu karang pada KKLD pulau Biawak dan sekitarnya?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengkaji keefektifan pengelolaan terumbu karang di Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) pulau Biawak dan sekitarnya?
2. Merumuskan rekomendasi strategi kebijakan pengelolaan KKLD pulau Biawak dan sekitarnya?

1.4. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau rekomendasi alternatif kebijakan pengelolaan KKLD pulau Biawak dan sekitarnya bagi pemerintah pusat maupun daerah demi tercapainya pengelolaan KKLD yang berkelanjutan.

1.4. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang terkait dengan kajian pengelolaan terumbu karang pada KKLD pulau Biawak dan sekitarnya di Kabupaten Indramayu yang berbeda waktu, lokasi dan objek tersaji pada Tabel 1.

No.	Nama	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1.	Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, SH (Tesis S2 Hukum UNDIP) Tahun 2008	Analisis Pengaturan Tentang Wilayah Laut Daerah Kabupaten Batang Dalam Rangka Mewujudkan Renstra Berdasarkan Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan wilayah pesisir Kab. Batang yang telah dilakukan selama ini ditinjau dari konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu 2. Menganalisis kendala-kendala yuridis yang dihadapi oleh Pemkab. Batang sehingga diperlukan pengelolaan wilayah pesisir terpadu 3. Menjelaskan upaya yuridis yang harus dilakukan oleh Pemkab Batang dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu 	<p>Penelitian deskriptif analitik melalui yuridis kualitatif</p>	<p>Untuk mengatasi kendala pengelolaan wilayah pesisir Kab. Batang selama ini, diperlukan pembuatan renstra untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu sesuai UU 27/2007</p>
2.	Yusmanto, Tesis Magister Ilmu Lingkungan UNDIP 2012	Kajian Kerawanan dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro Roban Kabupaten Batang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji peraturan perundang-undangan dan kebijakan mengenai pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) baik yang ditetapkan oleh pusat maupun daerah. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis kerawanan yang dapat mempengaruhi keber-lanjutan KKLD Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang. 3. Merumuskan rekomendasi alternatif kebijakan mengenai pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah yang menunjang kelautan dan perikanan berkelanjutan. 	<p>Analisis deskriptif, kualitatif, analisi menggunakan SWOT dan AHP</p>	<p>Ketidakepastian hukum terhadap KKLD Ujungnegoro – Roban Kabupaten Batang menyebabkan munculnya Kerawanan-kerawanan meliputi kerawanan ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, pencemaran, abrasi, sedimentasi, kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan, bencana alam, perubahan iklim dan rencana pembangunan PLTU batubara, sehingga diperlukan alternatif kebijakan pengelolaan KKLD adalah dengan meningkatkan daya dukung kawasan konservasi laut, peningkatan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dalam forum pengelolaan kawasan pesisir terpadu, pengembangan jaringan KKL terpadu untuk mendukung pengelolaan yang efektif, pengembangan ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal dan penegakan hukum peraturan perundangan.</p>

No.	Nama	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
3.	Gatot Sudiono, Tesis Magister Ilmu Lingkungan UNDIP 2008	Analisis Pengelolaan Terumbu Karang Pada Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pulau Randayan dan Sekitarnya Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis ancaman dan faktor-faktor penyebab kerusakan terumbu karang pada KKLD Pulau Randayan dan sekitarnya Kabupaten Bengkayang Prov. Kalbar 2. Menganalisis kegiatan pengelolaan terumbu karang yang telah dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder pada KKLD Pulau Randayan dan sekitarnya Kab. Bengkayan, Prov Kalimantan Barat terkait dengan upaya maksimal kepentingan masyarakat lokal khususnya dan kebijakan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan serta kearifan lokal 3. Merumuskan rekomendasi rencana strategis pengelolaan terumbu karang pada KKLD Pulau Randayan dan sekitarnya Kab. Bengkayang. 	Deskriptif kualitatif, analisis kebijakan menggunakan SWOT	KKLD Pulau Randayan dan sekitarnya belum memiliki perencanaan pengelolaan terumbu karang, baik berupa Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi.
4.	Mardijono Tesis Magister Ilmu Lingkungan UNDIP 2008	Persepsi dan Partisipasi Nelayan terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kota Batam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji persepsi masyarakat setempat mengenai KKLD dan manfaatnya. 2. Mengkaji partisipasi masyarakat setempat dalam mengelola KKLD tersebut 3. Mengkaji peranan pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola KKLD 4. Mengkaji hubungan (korelasi) antara persepsi dan partisipasi masyarakat dengan program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dalam mengelola KKLD 	Motode survei dengan analisis regresi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nelayan menyadari bahwa hasil tangkapan sangat tergantung kepada kondisi ekosistem yang baik (persepsi sedang hingga tinggi (70-75%)) 2. Nelayan mempunyai tingkat partisipasi sedang (67-68%) dimana masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pelestarian terumbu karang dan mangrove, sedangkan dalam pengawasan partisipasinya rendah. 3. Pemerintah dalam pengelolaan KKLD pada tiap-tiap kelurahan mempunyai tingkat peran “sedang” (66 -67%). 4. Terdapat hubungan yang erat antara persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat dan peran pemerintah terhadap KKLD.

No.	Nama	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
5.	Sukendi Darmansyah Tesis Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan IPB 2010	Daya Dukung Ekosistem Terumbu Karang untuk Wisata Bahari di Perairan Pulau Biawak dan Sekitarnya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat	1. Mengetahui kondisi biofisik terumbu karang terkait sebagai daerah wisata selam di perairan Pulau Biawak dan sekitarnya. 2. Menganalisis kesesuaian kawasan dan daya dukung biofisik terumbu karang untuk pengembangan wisata selam dikawasan tersebut. 3. Merumuskan arahan strategi pengembangan wisata selam berdasarkan daya dukung biofisik terumbu karang	Metode deskriptif kuantitatif	Arah strategi pengelolaan kawasan pengembangan ekowisata di perairan Pulau Biawak dan sekitarnya adalah sebagai berikut : a. Pemanfaatan dan pengelolaan terumbu karang sebagai kawasan wisata bahari secara berkelanjutan (kategori selam) b. Pengelolaan kawasan wisata degan berbagai upaya pencegahan kerusakan ekosistem terumbu karang c. Pengembangan sistem informasi dan kelembagaan serta meningkatkan saran dan prasarana pengelolaan wisata bahari d. Menjalankan dan menegakkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan daftar penelitian di atas, maka penelitian tentang “Kefektifan Pengelolaan Terumbu Karang pada Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dan Penataan Fungsi Pulau Biawak dan Sekitarnya di Kabupaten Indramayu” adalah penelitian dengan kajian, waktu, lokasi dan objek yang berbeda dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.